



Kebijakan Umum Keuangan
PT Cikarang Listrindo Tbk

*General Financial Policy
PT Cikarang Listrindo Tbk*

Rev. : 01

2025

Kebijakan Umum Keuangan ini menjadi dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan bisnis yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan Perseroan.

This General Financial Policy are the basis for consideration for making business decisions that may affect the Company's financial performance.

Manajemen merasa perlu untuk menyusun suatu panduan yang terperinci guna mengelola sumber daya keuangan Perseroan dan memberikan informasi dan pelaporan posisi serta kondisi keuangan untuk pengambilan keputusan dalam mencapai Visi dan Misi Perseroan.

Management believe it is necessary to develop a detailed guideline to manage the Company's financial resources and providing information and reporting on financial position and condition for decision making in achieving the Company's Vision and Mission.

Dalam mencapai tujuan tersebut, setiap Departemen khususnya yang berhubungan dengan kegiatan keuangan diharapkan memahami dengan baik kebijakan tersebut guna mengawasi jalannya operasional Perseroan sesuai dengan Kebijakan Umum Keuangan.

In achieving these objectives, each Department, especially those related to financial activities, is expected to have a good understanding of these policy in order to overseeing the Company's operations in accordance with the General Financial Policy.

Mengingat lingkungan bisnis yang dinamis, Kebijakan ini senantiasa akan disesuaikan dengan kondisi internal dan eksternal yang ada. Peninjauan berkelanjutan akan secara terus menerus dilakukan untuk mempertahankan standar kerja terbaik di Perseroan dan entitas anaknya secara keseluruhan.

Considering the dynamic business environment, this policy will always be adapted to existing internal and external conditions. Continuous review will always be conducted to maintain the highest work standard throughout the Company and its subsidiary.

Kebijakan Struktur Modal

Perseroan memastikan adanya keseimbangan antara ekuitas dan utang untuk mendukung pelaksanaan strategi jangka panjang dan jangka pendek.

Capital Structure Policy

The Company ensures a balance between equity and debt to support the implementation of long-term and short-term strategies.

Perseroan secara berkala memantau dan mempertahankan struktur modal yang efisien untuk mendukung pertumbuhan usaha yang berkesinambungan.

The Company regularly monitors and maintains an efficient capital structure to support its sustainable business growth.

Perseroan mengawasi modal dengan menggunakan rasio leverage, yaitu rasio utang neto (utang berbunga dikurangi kas dan setara kas dan deposito berjangka yang ditempatkan lebih dari 3 bulan) dibagi dengan laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, amortisasi, pos non-kas lainnya, serta setiap keuntungan/kerugian yang tidak berulang (EBITDA).

The Company monitors capital through leverage ratio, which is the ratio of net debt (interest bearing debt minus cash and cash equivalents and time deposits placed for more than 3 months) divided by profit before interest, taxes, depreciation, amortization, other non-cash items, and any non-recurring gain/losses (EBITDA).

Perseroan dan entitas anak menyusun Daftar Utang dan Pinjaman Bank beserta dengan *Covenants*-nya, yang kemudian daftar tersebut menjadi arahan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

The Company and its subsidiary compile a List of Debt and Bank Loans along with its Covenants, which then the list becomes the direction and consideration in making decisions.

Untuk menjaga kestabilan keuangan, serta mengurangi resiko keuangan, Perseroan menjaga rasio *leverage* tidak lebih dari 2,0x. Rasio tersebut akan ditinjau dan disesuaikan berdasarkan kebutuhan strategis dan kondisi pasar.

To maintain financial stability and reduce financial risk, the Company maintains its leverage ratio not be greater than 2.0x. This ratio will be reviewed and adjusted in accordance with strategic needs and market conditions.

Untuk utang yang berasal dari luar negeri, Perseroan mengacu pada Peraturan Bank Indonesia (PBI) tentang prinsip kehati-hatian dalam mengelola Utang Luar Negeri.

For debt originating from foreign, the Company refers to the Bank Indonesia Regulation (PBI) concerning the principle of prudence in managing External Debt.

Kebijakan Penganggaran

Direksi wajib menyusun anggaran untuk setiap tahun buku yang selanjutnya dimintakan persetujuan Dewan Komisaris. Proses penganggaran akan memastikan anggaran yang disusun adalah akurat dan sesuai dengan tujuan serta strategi Perseroan. Rencana kerja harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Budgeting Policy

The Board of Directors is required to prepare a budget for each financial year which is then requested for approval from the Board of Commissioners. The budgeting process will ensure that the budget prepared is accurate and in accordance with the goals and strategies of the Company. The budget must be submitted no later than 30 (thirty) days before the start of the next financial year.

Kebijakan Treasuri

Transaksi pengelolaan arus kas, transaksi perbankan, transaksi investasi atas dana *idle*, serta lindung nilai keuangan, nilai tukar, dan suku bunga dilaksanakan dengan memperhatikan pengendalian yang efektif untuk meminimalisir risiko dan meningkatkan imbal hasil atas transaksi tersebut.

Treasury Policy

Cash flow management transactions, banking transactions, investment on idle funds transactions, as well as financial hedge, exchange rates hedge, and interest rates are carried out with due observance of effective controls to minimize risk and increase returns on these transactions.

Perseroan akan menempatkan dana pada bank dan/atau lembaga keuangan yang memiliki legalitas dan izin operasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia dan internasional. Penempatan dana dalam bentuk deposito atau produk perbankan sejenis akan dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kesehatan bank, termasuk kategori Kelompok Bank Berdasarkan Modal Inti (KBMI) dan/atau peringkat kredit jangka panjang dari lembaga pemeringkat internasional.

The Company will only place funds in banks and/or financial institutions that are legally established and licensed to operate in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia and internationally. Fund placements in the form of deposits or similar banking products shall be made with due consideration of the financial soundness of the bank, including its classification under the Capital-Based Bank Group (KBMI) and/or its long-term credit rating issued by international credit rating agencies.

Untuk memastikan penempatan dana hanya pada bank dan/atau lembaga keuangan seperti dipersyaratkan diatas, Perseroan akan melakukan penilaian secara berkala setiap bank dan/atau lembaga keuangan dimana Perseroan menempatkan dananya. Perseroan juga membatasi tingkat risiko dengan menjaga porsi dana di setiap bank tidak melebihi 20% dari jumlah kas dan setara kas dan investasi yang dikelola Perseroan. Ketentuan lebih lanjut terkait penempatan dana akan diatur dalam *Standard Operating Procedure (SOP)* Departemen Keuangan.

To ensure that the placement of funds is only with bank and/or financial institutions as required above, The Company will periodically assess each bank and/or financial institution where the Company places its funds. The Company also limits its risk exposure by ensuring that the portion of funds placed in any single bank does not exceed 20% of the total cash and cash equivalents and investments managed by the Company. Further provisions regarding fund placements shall be governed under the Finance Department's Standard Operating Procedure (SOP).

Seluruh transaksi keuangan yang dilakukan dalam negeri wajib menggunakan mata uang Rupiah sesuai dengan PBI yang berlaku, kecuali transaksi dengan pemasok yang telah mendapatkan pengecualian kebijakan PBI. Sementara transaksi dengan pihak asing mengacu pada PBI tentang Lalu Lintas Devisa (LLD).

All financial transactions conducted domestically are required to use Rupiah in accordance with the applicable PBI, except for transactions from suppliers that have been granted an exemption under the PBI policy. Meanwhile, transactions with foreign parties refer to the PBI regarding foreign exchange flows (LLD).

Secara khusus, Perseroan tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk eksposur valuta asing. Mata uang fungsional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat (USD) dan formula tarif listrik yang diberikan Pemerintah adalah mengacu kepada USD, sehingga secara alami, Perseroan memiliki lindung nilai. Namun, untuk meminimalkan eksposur Perseroan terhadap rugi kurs mata uang asing, Perseroan melakukan penyesuaian bulanan nilai tukar mata uang asing dalam tagihan kepada pelanggan. Selain itu, Perseroan berupaya untuk memaksimalkan penempatan kas dan setara kas dan investasi dalam mata uang USD dalam jangka panjang.

In particular, the Company does not have a formal hedging policy for foreign exchange exposure. The Company functional currency is in the United State Dollar (USD) and our formulation electricity tariff given by the government is in USD terms, resulting a natural hedge position for the Company. However, to minimize the Company's exposure to foreign exchange losses, the Company make monthly adjustments to foreign currency exchange rates in its invoices to customers. In addition, the Company aims to maximize its cash and cash equivalents and investments holdings in USD over the long-term.

Perseroan dapat menerbitkan dan/atau menerima *Standby Letter of Credit* (SBLC)/Bank Garansi (BG) jika disyaratkan sebagai *term of payment* dalam suatu transaksi dengan pihak kedua. Penerbitan SBLC/BG melalui bank dimana Perseroan telah memiliki fasilitas dan juga dapat diterima oleh pihak kedua, sementara SBLC/BG yang diterima Perseroan harus melalui prosedur pengecekan keabsahan oleh tim *treasury*.

The Company may issue and/or receive Standby Letter of Credit (SBLC)/Bank Guarantee (BG) if required as a term of payment in a transaction with a second party. Issuance of SBLC/BG through a bank where the Company already has facilities and can also be accepted by a second party, while the SBLC/BG received by the Company must go through a procedure for checking the validity by the treasury team.

Selain SBLC dan BG, Perseroan juga dapat memiliki fasilitas *forex-line* dan *working capital*, yang tergabung dengan fasilitas SBLC, yang hanya dapat digunakan sesuai dengan arahan manajemen.

In addition to SBLC and BG, the Company may also has forex-line and working capital facilities, which are combined with the SBLC facility and can only be used in accordance with management directions.

Kebijakan Pendanaan Jangka Pendek

Perseroan memastikan tersedianya sumber pendanaan jangka pendek guna mempertahankan arus kas, menjaga likuiditas, dan memastikan tersedianya kas untuk pengeluaran dan membayar kewajiban Perseroan. Perseroan menjaga nilai kas dan setara kas pada level minimal sebesar AS\$100 juta atau setara dengan 3 (tiga) bulan dana yang dibutuhkan untuk operasional Perseroan.

Short-Term Funding Policy

The Company ensures the availability of short-term funding sources to maintain cash flow, maintain liquidity, and ensure the availability of cash for expenses and to pay the Company's obligations. The Company maintains cash and cash equivalents at a minimum level of US\$100 million or equivalent to 3 (three) months of the required funds for the Company's operations.

Kebijakan Corporate Finance

Perseroan memastikan terlaksananya proses evaluasi dari segi keuangan atas proyek-proyek pengembangan bisnis, dan transaksi merger/akuisisi serta strategi pendanaannya dan analisa dampak keuangan terhadap keuangan Perseroan. Secara umum, Perseroan membatasi pengeluaran pengembangan bisnis per tahun pada level sebesar AS\$100 juta per tahun. Perseroan akan melakukan reviu secara berkala terkait rencana pengeluaran ke depannya sesuai dengan posisi bisnis dan keuangan Perseroan di masa depan.

Corporate Finance Policy

The Company ensures the implementation of the evaluation process from a financial perspective on business development projects, and merger/acquisition transactions as well as their funding strategy and analysis of the financial impact on the Company's finances. In general, the Company limits its business development spending per year at the level of US\$100 million per year. The Company will conduct periodic reviews of its future spending plans in accordance with its future business and financial position.

Kegiatan Pengembangan bisnis yang tergolong ke dalam transaksi material perlu dijelaskan kepada Pemegang Saham dan sesuai dengan Peraturan OJK yang berlaku.

Business development activities that are classified as material transactions need to be disclosed to Shareholders and in accordance with the applicable OJK Regulations.

Kebijakan Asuransi

Manajemen harus memastikan bahwa Perseroan memiliki asuransi yang dapat diandalkan yang dapat memberikan perlindungan terhadap risiko-risiko Perseroan dengan biaya yang wajar serta dengan kemudahan untuk melakukan klaim atas kerugian jika diperlukan, sehingga dapat memperoleh hasil klaim atas kerugian yang timbul sesuai dengan yang diajukan.

Insurance Policy

Management should ensure that the Company has a reliable insurance management processes in order to provide protection against the Company's risks at a reasonable cost and easy to claim for losses if necessary, so that can obtain the result of a claim for damages in accordance with what is proposed.

Kebijakan Aset Program Imbalan

Manajemen harus memastikan bahwa Perseroan memiliki aset program imbalan yang memadai untuk memenuhi kewajiban imbalan kerja karyawan tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan aset program imbalan harus dilakukan dengan berorientasi jangka panjang, dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, keberlanjutan, serta optimalisasi hasil investasi.

Benefit Plan Asset Policy

Management should ensure that the Company maintains adequate benefit plan assets to meet its employee benefit obligations in a timely manner and in accordance with applicable regulations. The management of benefit plan assets shall be carried out with a long-term orientation, taking into account the principles of prudence, sustainability, and investment return optimization.

Evaluasi kecukupan aset program dilakukan secara berkala dengan mengacu pada laporan penilaian aktuaris yang disusun oleh aktuaris independen. Selain itu, hasil pengembangan investasi dievaluasi secara berkala dengan membandingkan tingkat pengembalian produk sejenis di pasar guna memastikan kinerja investasi tetap optimal dan sesuai dengan tujuan pendanaan jangka panjang.

The adequacy of benefit plan assets shall be evaluated periodically with reference to the actuarial valuation report prepared by an independent actuary. In addition, the performance of investment returns shall be assessed regularly by comparing them against the returns of similar market products to ensure that investment performance remains optimal and aligned with the long-term funding objectives.

Kebijakan Akuntansi

Perseroan wajib mencatatkan dan menyajikan laporan keuangan sesuai prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum, yang mewajibkan pengungkapan seluruh transaksi material yang mempengaruhi perubahan nilai aset, kewajiban, dan modal.

Accounting Policy

The Company is required to books and present financial statements in accordance with generally accepted accounting principles, which require disclosure of all material transactions that affect changes in the value of assets, liabilities and capital.

Seluruh kebijakan yang berkaitan dengan akuntansi dan pelaporan keuangan wajib disajikan dalam laporan keuangan dan akan selalu mengacu pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK).

All policies related to accounting and financial reporting must be disclosed in financial statements and will always refer to the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK).

Untuk hal-hal lain yang belum diatur dalam PSAK, pengungkapan yang dilakukan Perseroan akan secara terus-menerus mempertimbangkan aspek relevansi dengan kebutuhan pengguna agar Laporan Keuangan dapat diandalkan.

For other matters that have not been regulated in PSAK, the disclosures made by the Company will continuously consider aspects of relevance to the needs of users so that the Financial Statements can be relied on.

Kebijakan Perpajakan

Direksi wajib memastikan bahwa Perseroan mengelola pajak dengan baik dan benar. Setiap transaksi keuangan wajib diperiksa implikasi terhadap peraturan pajak yang berlaku. Direksi diperbolehkan untuk menunjuk konsultan pajak atau konsultan hukum untuk membantu dalam isu perpajakan.

Tax Policy

The Board of Directors have to ensure that the Company manages taxes properly and correctly. Every financial transaction must be examined for the implications of the applicable tax regulations. The Board of Directors is allowed to assign tax consultants or legal consultants to help with taxation issue.

Kebijakan Dividen

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku, Perseroan dapat membagikan dividen secara teratur. Pembayaran dividen mengacu pada ketentuan-ketentuan yang terdapat pada Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham pada RUPS, peraturan pasar modal yang berlaku, serta mempertimbangkan kewajaran atas pembayaran tersebut dan juga kepentingan Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- (i) hasil operasi, arus kas, serta kondisi keuangan dan permodalan Perseroan;
- (ii) hukum; dan
- (iii) prospek masa depan Perseroan, termasuk rencana pengembangan usaha dan rencana investasi.

Dividen interim dapat dibagikan sebelum tahun buku Perseroan berakhir selama tidak melanggar ketentuan dari Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor.

Pembagian atas dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan ketentuan bahwa dividen interim akan diperhitungkan dengan dividen yang akan dibagikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.

Kebijakan Rencana Aksi Keuangan Anak Perusahaan

Setiap aksi keuangan yang dilakukan oleh anak perusahaan Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan meminjam atau meminjamkan uang atas nama anak perusahaan; mengikat anak perusahaan sebagai penanggung/penjamin; membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan dan hak atas tanah serta perusahaan; membuka lini usaha baru, wajib memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Perseroan selaku *ultimate parent company*.

Persetujuan ini diperlukan untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil oleh anak perusahaan selaras dengan strategi bisnis dan keuangan grup, mempertimbangkan kapasitas pendanaan, profil risiko, dan dampaknya terhadap kinerja dan struktur keuangan konsolidasi. Setiap pengajuan harus disertai dengan kajian kelayakan dan analisis risiko yang memadai.

Dividend Policy

In accordance with the applicable Indonesian laws and regulations, the Company may distribute dividends regularly. Dividend payment refers to the provisions stated in the Company's Articles of Association and shareholder approval at the GMS, applicable capital market regulations, and considers the fairness of the payment as well as the Company's interest.

The determination of the amount and payment of dividends depends on the recommendations of the Board of Directors of the Company by considering several factors, among others:

- (i) operation result, cash flows, as well as the financial condition and Company's capital;*
- (ii) law; and*
- (iii) the Company's future prospects, including business development plans and investment plans.*

Interim dividends can be distributed before the end of the Company's financial year as long as it does not violate the provisions of the Company's Articles of Association and the distribution do not cause the Company's equity to be lower than the issued and paid-up capital.

The distribution of interim dividends is determined by the Board of Directors after obtaining approval from the Board of Commissioners, provided that the interim dividend will be taken into account with dividends to be distributed based on the decision of the next General Meeting of Shareholders.

Policy on Financial Action Plans of Subsidiaries

Any financial action undertaken by any subsidiary of the Company, including but not limited to borrowing or lending funds in the name of the subsidiary; binding the subsidiary as a guarantor; acquiring, disposing of, or otherwise transferring rights over immovable assets, including buildings, land rights, and companies; or initiating a new line of business, must first obtain prior approval from the Company as the ultimate parent company.

Such approval is required to ensure that each action taken by the subsidiary is aligned with the Group's business and financial strategy, taking into account funding capacity, risk profile, and its impact on consolidated financial performance and structure. Each proposal must be supported by a proper feasibility study and risk analysis.

Kebijakan Pemantauan Keuangan

Perseroan harus memastikan adanya pemantauan secara periodik atas kondisi keuangan Perseroan baik dari sisi akuntansi keuangan, akuntansi manajemen maupun *corporate finance* serta kemampuan proses keuangan dalam mendukung pelaksanaan strategi Perseroan untuk menjamin bahwa risiko informasi keuangan (*financial reporting risk*) terkendali dan terkelola dengan baik oleh Perseroan.

Perseroan menjaga dan menilai pemenuhan *covenants* daripada *Senior Notes* yang diterbitkan oleh Perseroan sesuai dengan *Indenture*. Dokumen penilaian tersebut disusun oleh Departemen Investor Relations & Corporate Finance setiap kuartal.

Perseroan wajib memelihara sistem pengendalian internal keuangan yang menjamin keandalan, efektivitas, dan efisiensi dalam proses manajemen Perseroan dan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku.

Risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan Perseroan adalah risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang asing dan risiko harga), risiko kredit dan risiko likuiditas.

Risiko suku bunga

Senior Notes 2035 milik Perseroan, memiliki bunga tetap sebesar 5,65% per tahun dan oleh karena itu terimbas dampak nilai wajar risiko suku bunga, tetapi tidak terimbas dampak risiko suku bunga arus kas.

Risiko mata uang asing

Mata uang fungsional Perseroan adalah Dolar Amerika Serikat. Perseroan memiliki eksposur terhadap risiko valuta asing terkait dengan biaya atas pembelian tertentu dalam mata uang Rupiah dan mata uang lainnya yang berbeda dari mata uang fungsional. Untuk meminimalkan eksposur Perseroan terhadap rugi kurs mata uang asing, Perseroan diperbolehkan untuk melakukan penyesuaian bulanan nilai tukar mata uang asing dalam tagihan kepada pelanggan.

Risiko kredit

Risiko kredit mengacu pada risiko bahwa mitra usaha tidak akan memenuhi kewajiban kontraktualnya yang mengakibatkan kerugian keuangan bagi Perseroan. Perseroan mengelola dan mengendalikan risiko kredit dengan menetapkan batasan jumlah risiko dimana Perseroan bersedia untuk menerima dari pelanggan individu dan mitra usaha. Manajemen wajib melakukan prosedur verifikasi untuk semua pelanggan dan mitra usaha yang akan bertransaksi. Selain itu, saldo piutang

Financial Monitoring Policy

The Company have to ensure there is periodic monitoring of the Company's financial condition in terms of financial accounting, management accounting and corporate finance as well as the ability of financial processes to support the implementation of the Company's strategy to ensure that the financial reporting risk is under control and well managed by the Company.

The Company maintains and assesses the fulfillment of covenants of the Senior Notes issued by the Company in accordance with the Indenture. Such assessment document is prepared by the Investor Relations & Corporate Finance Department quarterly.

The Company is required to maintain a financial internal control system that ensures reliability, effectiveness, and efficiency in the Company's management processes and compliance with applicable laws and regulations.

The main risks arising from the Company's financial instruments are interest rate risk, market risk (including currency risk and price risk), credit risk and liquidity risk.

Interest rate risk

The Senior Notes 2035 owned by the Company, bear interest at a fixed interest rate of 5.65% per annum, and therefore subject to fair value interest rate risk but not subject to cash flow interest rate risk.

Foreign currency risk

The Company functional currency is the United States Dollar. The Company are exposed to foreign exchange risk as their costs of certain key purchases are denominated in Rupiah and other currencies different from their functional currency. To minimize the Company's exposure to foreign exchange losses, the Company is allowed to make monthly foreign exchange rate adjustments in billings to customers.

Credit risk

Credit risk refers to the risk that a counterparty will default on its contractual obligations resulting in financial loss to the Company. The Company manages and controls credit risk by setting limits on the amount of risk where the Company is willing to accept from individual customers and counterparties. Management to perform verification procedures to all customers and counterparties they are going to transact with. In addition, receivable balances are

dipantau secara terus-menerus untuk mengurangi eksposur piutang tidak tertagih. Piutang dari penjualan tenaga listrik, sampai batas tertentu, ditutupi dengan jaminan pelanggan.

monitored on an on-going basis to reduce exposure to bad debts. Receivables from sale of electric power, to a certain extent, are covered by customers' deposits.

Sehubungan dengan penempatan dari kas dalam lembaga keuangan, Perseroan melakukan transaksi hanya dengan lembaga keuangan yang sehat secara finansial. Perseroan juga memonitor penempatan dana pada masing-masing lembaga keuangan, serta menjaga komposisi dari masing-masing penempatan tersebut, dengan tujuan menjaga konsentrasi risiko kredit.

With respect to placements of cash in financial institutions, the Company transact only with financially sound financial institutions. The Company also monitors the placement of funds in each financial institution, and maintains the composition of each placement, with the aim of maintaining the concentration of credit risk.

Risiko kredit yang timbul dari aset keuangan, yang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lain lain, dan investasi berkaitan dengan eksposur Perseroan terhadap kerugian dari kemungkinan kegagalan pihak lain.

Credit risk arising from the financial assets, which include cash and cash equivalents, trade and other receivables, and investments relates to the Company's exposure to losses from the possible default of the counterparties.

Risiko likuiditas

Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perseroan tidak akan mampu menyelesaikan semua kewajiban saat jatuh tempo. Perseroan mengelola risiko ini melalui pemantauan arus kas dengan mempertimbangkan pembayaran masa mendatang dan penagihan. Perseroan memantau dan menjaga tingkat kas dan setara kas yang dianggap memadai untuk membiayai operasional. Perseroan juga secara rutin mengevaluasi arus kas proyeksi dan aktual.

Liquidity risk

Liquidity risk is the risk that the will not be able to settle all liabilities as they fall due. The Company manage this risk through monitoring of cash flows in consideration of future payments and collections. The Company monitor and maintain a level of cash and cash equivalents deemed adequate to finance their operations. The Company also regularly evaluate the projected and actual cash flows.

Risiko harga

Risiko harga adalah risiko dimana harga instrumen keuangan Perseroan, yaitu, investasi tersedia untuk dijual, akan berfluktuasi karena perubahan harga di pasar umum, tanpa memperhatikan apakah disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang timbul dari instrument individu atau penerbitnya, atau faktor-faktor yang mempengaruhi semua instrumen yang diperdagangkan di pasar. Perseroan menginvestasikan kelebihan uang tunai hanya dalam surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang sehat secara keuangan.

Price risk

Price risk is the risk that the price of the Company's financial instruments, i.e., available-for-sale investments, will fluctuate due to changes in the general market price, regardless of whether caused by specific factors attributable to the individual instruments or their issuer, or factors affecting all the instruments that are traded in the market. The Company invests its excess cash only on securities issued by financially sound institutions.

Risiko penurunan peringkat kredit

Risiko penurunan peringkat kredit adalah risiko dimana Perseroan tidak memiliki *Investment Grade Rating* dari salah satu lembaga pemeringkat internasional, S&P, Fitch dan Moody's.

Credit rating downgrade risk

Credit rating downgrade risk refers to the risk that the Company may not maintain an Investment Grade Rating from one of the major international credit rating agencies, namely S&P, Fitch, and Moody's.

Saat ini, Senior Notes 2035 Perseroan telah memperoleh *Investment Grade Rating*, yaitu peringkat BBB- dari S&P dan peringkat Baa3 dari Moody's.

Currently, the Company's Senior Notes 2035 have been assigned an Investment Grade Rating of BBB- by S&P and Baa3 by Moody's.

CIKARANG LISTRINDO

Perseroan akan senantiasa menjaga rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan oleh lembaga pemeringkat, guna memastikan pemenuhan kriteria Peringkat Investasi.

The Company will consistently maintain its financial ratios as required by the rating agencies, to ensure compliance with Investment Grade criteria.

Disiapkan oleh / *Prepared by,*



Nama / *Name* : Christanto Pranata
Jabatan / *Title* : Direktur ESG & Keuangan /
ESG & Financial Director

Diketahui dan disetujui oleh / *Acknowledged and approved by,*



Nama / *Name* : Andrew K. Labbaika
Jabatan / *Title* : Direktur Utama /
President Director



Nama / *Name* : Png Ewe Chai
Jabatan / *Title* : Wakil Direktur Utama /
Vice President Director



Nama / *Name* : Richard N. Flynn
Jabatan / *Title* : Direktur Teknik /
Technical Director



Nama / *Name* : Yudho Pratikto
Jabatan / *Title* : Direktur Pemasaran &
Pengembangan Bisnis /
Marketing & Business
Development Director



Nama / *Name* : Winan Kusno
Jabatan / *Title* : Compliance & Legal
Associate Director



Nama / *Name* : Linda Lotjanawan
Jabatan / *Title* : HR & Procurement
Associate Director